



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
UNIT KERJA : RSD MANGUSADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN DARTA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 476090

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.201.250.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 820 m²/35 m² di KAB / KOTA BADUNG, WARISAN Rp. 2.021.250.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m²/100 m² di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/72 m² di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.500.000

1. MOBIL, SUZUKI AVI414F SDX(4X2) MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 81.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA NF 100 Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA E1FO2N11M2 AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, SUZUKI SPM SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 81.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 46.500.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 112.320.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 11.000.000

Sub Total Rp. 3.541.570.000



III. HUTANG

Rp.

60.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.481.570.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.